

PELAKSANAAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA MANDALA SUCI WENARA WANA OLEH DESA ADAT PADANGTEGAL KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR

Ni Komang Ayu Sri Widiari, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
ayusriwidiari18@gmail.com, idaayuputuwidati@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Objek wisata dapat dikatakan sebagai sumber daya alam, hasil dari pemanfaatannya menghasilkan peningkatan ekonomi. Alam sekitar di Bali dijadikan sebagai destinasi wisata yang menarik seperti objek wisata Mandala Suci Wenara Wana yang dikelola langsung secara mandiri oleh Desa Adat Padangtegal. Pengelolaan masih terlihat banyak yang tidak sesuai dengan prosedur, terlihat dari segi penjagaan lingkungan, masih terdapat pembuangan sampah. Untuk itu, penelitian ini mengkaji pengaturan pelaksanaan pengelolaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan menjelaskan implikasi dari pelaksanaan pengelolaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana yang dikelola Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, sumber data yang digunakan ada dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan objek Wisata Mandala Suci Wenara Wana belum berjalan secara maksimal dikarenakan terdapat kekosongan dalam pengaturan pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan hingga saat ini. Implikasi dari pengelolaan Objek Wisata Mandala Suci Wenara Wana dari segi perekonomian yakni pemanfaatan lahan sebagai tempat usaha, dan menikmati fasilitas parkir yang berada di area objek wisata secara bebas, akan tetapi kenyamanan dan keamanan masyarakat yang berada di sekitar objek terganggu akibat keberadaan monyet yang sering berkeliaran ke rumah warga.

Kata Kunci : Implikasi, Objek Wisata, Pengelolaan

Abstract

Tourism objects can be regarded as natural resources, the results of their use resulting in an increase in the economy. The surrounding nature in Bali is used as an attractive tourist destination such as the Mandala Suci Wenara Wana tourist attraction which is managed directly independently by the Padangtegal Traditional Village. Management still looks a lot that is not in accordance with the procedures, seen in terms of environmental protection, there is still garbage disposal. For this reason, this study examines the implementation of the management of the Mandala Suci Wenara Wana tourism object, Padangtegal Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency and explains the implications of implementing the management of the Mandala Suci Wenara Wana tourist attraction which is managed by the Padangtegal Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency. This study was designed with empirical legal research with a sociology of law approach, the data sources used were two, namely primary and secondary legal materials. To obtain valid data, researchers collected data using observation, documentation, and interview techniques. The results of the study indicate that the implementation of the management of the Mandala Suci Wenara Wana Tourism object has not run optimally because there is a vacancy in the arrangement of the party who has the authority to carry out the management to date. The implications of managing the Mandala Suci Wenara Wana Tourism Object from an economic point of view are the use of land as a place of business, and enjoying free parking facilities in the tourist attraction area, but the comfort and safety of the people around the object are disturbed due to the presence of monkeys that often roam to people's homes.

Keywords: *implications, tourism object, management*

I. PENDAHULUAN

Objek wisata adalah suatu penggunaan hasil daya bumi yang mempunyai nilai ekonomi yang besar dalam bidang pendapatan global. Objek wisata juga salah satu daya tarik suatu Negara untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (Suwena & Widyatmaja, 2010) & (Primadona, 2011). Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan daya tarik pariwisata yang memiliki berbagai

kapabilitas hasil daya bumi yang sangat melimpah, yang didalamnya terdapat aset-aset budaya dan sejarah serta potensi alamnya berupa hewan dan tumbuhan yang merupakan ketertarikan yang diminati turis-turis. Dengan pengelolaan pariwisata banyak objek wisata yang dibangun dan dikembangkan oleh daerah-daerah di Indonesia dikarenakan objek wisata dianggap sebagai penyelesaian masalah ekonomi.

Pengelolaan termasuk suatu sistem yang bersifat unik dan memiliki ciri khas tersendiri dalam melakukan pengendalian, perencanaan, pergerakan maupun pengelompokkan yang bertujuan untuk memenuhi tujuan dalam mengelola pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Terry, 2012). Konsep pengelolaan yaitu sebagai suatu prosedur dalam penyelarasan sistem kerja dengan tujuan dapat terselesaikannya pekerjaan dengan praktis dan berhasil (Mraiya, 2010). Kontribusi yang dilakukan oleh bidang pariwisata yang sangat penting yaitu dengan menambah dan menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerintah dalam memelihara infrastruktur serta menjaga warisan budaya yang ditinggalkan leluhur agar tetap lestari (Suryawati, 2018). Peran serta pemerintah maupun swasta dalam mengatur pembangunan objek wisata juga sangat penting (Djadjuli, 2018). Banyak daerah di Indonesia menjadikan potensi alam dan budayanya menjadi destinasi wisata, oleh sebab itu perlunya kontribusi serta kerjasama pemerintah dengan swasta maupun masyarakat demi terjaganya kondusifitas pariwisata. Untuk mewujudkan pariwisata yang aman maka perlunya peran pemerintah dalam mengatur kebijakan- kebijakan dalam kepariwisataan.

Salah satunya, Provinsi Bali yang merupakan Daerah pariwisata yang dikenal di seluruh penjuru mancanegara dengan keindahan alamnya serta budaya yang saat ini masih eksis. Turis nasional dan mancanegara sudah mengenal dengan baik bahwa Bali merupakan pulau yang terdapat banyak bangunan suci. Hampir seluruh daerah di Pulau Bali menjadi objek wisata karena banyaknya alam yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan objek wisata seperti pantai, hutan, pegunungan, sawah, danau, sungai, dan lainnya serta sumber daya manusia yang ditinggalkan oleh leluhur berupa pura, candi-candi, budaya, spiritual, serta tradisi. Bali terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, dimana di setiap Kabupaten/Kota memiliki objek wisata dengan potensi alam yang berbeda-beda yang dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi masing-masing daerah.

Perkembangan objek wisata di Bali melaju dengan pesat karena selain keindahan alamnya banyak wisatawan dalam Negeri maupun luar Negeri ingin melihat adat istiadat, budaya serta tradisi yang ada di Pulau Bali yang disuguhkan masih dijaga turun temurun sampai saat ini. Alam sekitar yang ada di Bali tak luput dijadikan juga sebagai destinasi wisata yang tak kalah menarik seperti objek wisata Mandala Suci Wenara Wana yang berada di Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. objek wisata ini dikelola langsung secara mandiri oleh Desa Adat Padangtegal. objek Wisata Mandala Suci Wenara Wana adalah sebuah hutan yang didalamnya ditinggali kewan monyet yang berada di lingkungan Desa Adat Padangtegal, didalamnya juga terdapat beberapa Pura yaitu Pura Dalem Agung, Pura Beji, Pura Prajapati, serta terdapat kuburan warga Desa Adat Padangtegal dan juga terdapat aliran sungai yang merupakan tempat pemandian suci.

Objek wisata membawa pengaruh baik dalam menjadikan ekonomi Desa mengalami peningkatan, banyak masyarakat yang diuntungkan dengan adanya objek wisata tersebut. Dalam pengelolaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana perlu adanya aturan sebagai dasar atau acuan dalam pengelolaannya. Sistem pengelolaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana pada awig-awig Desa Adat Padangtegal telah mengatur mengenai pengelolaan objek wisata Wenara Wana, akan tetapi Pemerintah Desa dalam menjalankan pengelolaannya perlu adanya peningkatan agar sistem pengaturannya menjadi lebih efektif dan efisien serta secara sosial dapat diterima baik oleh masyarakat Desa Adat maupun masyarakat luas. Dalam pengelolaannya Pemerintah Desa tetap mengutamakan konsep Tri Hita Karana karena pada prinsipnya masyarakat Bali khususnya masyarakat Desa Adat Padangtegal tetap memelihara keselarasan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Hutan ini terdapat di tengah lingkungan masyarakat, ada banyak toko, rumah warga dan penginapan wisatawan oleh sebab itu pelaksanaan pengelolaan juga perlu memperhatikan lingkungan setempat karena tak jarang ada beberapa kewan monyet yang memasuki kawasan penduduk serta merusak fasilitas warga Desa Adat dan dikhawatirkan akan dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata secara substansi terdapat beberapa lembaga organisasi kepariwisataan, objek wisata Mandala Suci Wenara Wana dikelola secara mandiri oleh

Desa Adat Padangtegal yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Bali nomor 5 tahun 2020. Dalam objek wisata banyak faktor penunjang akan berhasil atau tidaknya suatu hukum (Soekanto, 2007). Peran Desa Adat dalam menjalankan otonomi Daerah sangat penting untuk meningkatkan sumber pendapatan di setiap Daerah serta dalam fungsinya Desa Adat membantu Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pusat dalam kelancaran pembangunan di semua bidang dengan memanfaatkan hasil daya bumi yang terdapat di lingkungan Desa Adat Padangtegal. keberadaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana banyak memberikan dampak terhadap masyarakat Desa Adat Padangtegal dan warga di sekitarnya baik dari segi positif maupun negatif.

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini terfokus pada kajian

Telaah peraturan pelaksanaan pengelolaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan mengungkapkan implikasi dari pelaksanaan pengelolaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana yang dikelola Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem ilmiah dalam meneliti, menjabarkan, mengembangkan serta untuk semakin memahami sehingga terpecahkannya masalah. Sistem ini diperuntukkan dalam proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan suatu sistem ilmiah dimana terdapat pengetahuan di dalamnya. Karena secara harfiah ilmu digunakan untuk mendapatkan hubungan yang tersusun (Sunggono, 2003). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris melalui Pendekatan sosiologis yaitu dengan meneliti fakta-fakta nyata yang ada di lokasi penelitian mengenai pengelolaan objek wisata yang dilakukan Desa Adat dengan melihat aspek ikatan antar manusia dengan kehidupan alam yang sudah terjalin (Ibrahim, 2008). Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan berdasarkan teori-teori dan konsep dalam pengaturan pengelolaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana oleh Desa Adat Padangtegal dan pendekatan konsep digunakan untuk memahami dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya objek wisata mandala suci wenara wana. Adapun data utama yaitu Bahan hukum primer merupakan sumber data yang berasal dari peraturan Perundang-undangan yang mempunyai sifat konkret dan jelas. Bahan hukum sekunder diantaranya, banyak diambil dari buku-buku yang berkaitan akan topik penelitian, jurnal-jurnal yang mendukung dalam penelitian, kamus-kamus yang meliputi aturan, serta pendapat para ahli yang sekiranya mempunyai kapabilitas besar. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum terakhir dimana penggunaannya melengkapi bahan hukum sebelumnya yang berupa, KBBI, ensiklopedia, dan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, studi Dokumen, wawancara. Dalam penelitian ini menjadikan objek Wisata Mandala Suci Wenara Wana sebagai lokasi penelitian yang bertempat di Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dengan pengolahan data secara deskriptif analisis, yaitu analisis menjabarkan semua data-data yang ada dan diolah dengan mempersatukan antara data primer dan sekunder (Waluyo, 1996).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

Pariwisata merupakan suatu prosedur kesinambungan perjalanan yang dilakukan oleh manusia ke suatu daerah tempat atau negara yang dimana dalam proses tersebut terdapat transportasi, kuliner, dan objek hiburan. Pengelolaan objek wisata adalah suatu tindakan yang dalam pelaksanaan tidak terlepas dari pihak sebagai pendukung pelaksanaannya, termasuk dalam hal pengelolaan objek Wisata Mandala Suci Wenara Wana sebagai salah satu objek wisata yang terletak di Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Pihak yang dimaksud dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata tersebut ialah Lembaga Desa Adat Padangtegal.

Pariwisata dapat dikatakan termasuk devisa yang bersifat global bagi suatu Negara menunjukkan daya saingnya dengan Negara lain dalam mendatangkan turis mancanegara ke Negara mereka. Pengelolaan dan pelestarian pariwisata sudah menjadi hal yang harus dilakukan berbagai negara yang diharapkan dengan mengembangkan pariwisata dapat menjaga keselarasan aset-aset kebudayaan, agama, lingkungan hidup, serta dapat menunjukkan karya Tuhan Yang Maha Esa akan alam Indonesia

(Salambue et al., 2020). Dalam suatu pengelolaan tidak terlepas dari nilai luhur dan kearifan lokal yang juga menjadi landasan dalam menjalankan suatu pengelolaan yang dijadikan acuan dalam suatu penyelenggaraan kepariwisataan. Landasan ini tentu menjadi hal utama dalam menjalankan suatu kepariwisataan karena dapat bersumber melalui ajaran-ajaran agama, kebudayaan, tradisi, dan adat istiadat, yang nantinya akan menjadi acuan dalam menjalankan suatu pengelolaan.

Pada konsep pelaksanaan pentingnya aturan hukum dalam menjalankan suatu pengelolaan. Keberhasilan suatu pelaksanaan pengelolaan objek wisata bergantung dengan aturan hukum yang berlaku, pada dasarnya semua pengelolaan harus ada konsep yang menjadi suatu acuan menjalankan objek wisata agar terwujudnya pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dijelaskan pada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. objek wisata Mandala Suci Wenara Wana pada dasarnya juga menggunakan konsep Tri Hita Karana. Konsep ini baku di Pulau Bali mengingat keseimbangan alam perlu dijaga. Dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antar makhluk hidup mengingat selain monyet dan hutan di dalam kawasan objek wisata juga terdapat beberapa tempat suci diantaranya Pura Dalem Agung, Pura Prajapati, Pura Beji dan juga terdapat kuburan warga Desa Adat Padangtegal. Hal ini menjadi suatu hubungan yang terkait dan harus dijaga satu sama lain agar semua kehidupan dapat berjalan seimbang.

Aturan merupakan suatu landasan yang dibuat untuk mengatur suatu kebijakan-kebijakan tertentu. Dalam menjalankan suatu pengelolaan perlu adanya suatu pengaturan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya (Ansari, 2014). Pengaturan tentang Kepariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pentingnya pengaturan dalam suatu pengelolaan menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Pengawasan dari pemerintah dan juga masyarakat sangat penting dalam kesinambungan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari daya tarik wisata. Pengaturan dari suatu objek wisata juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku serta didukung dengan nilai seni, budaya dan agama yang nantinya saling bersinergi dalam pembentukan aturan dalam pelaksanaan pengelolaan. Penerapan peraturan pengelolaan objek Wisata Mandala Suci Wenara Wana belum diatur secara khusus dalam awig-awig maupun pararem. Awig-awig hanya menyebutkan kepemilikan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana yang disebutkan dalam palet 8 pawos 61 indik druwe Desa.

2. Implikasi dari Pelaksanaan Pengelolaan objek Wisata Mandala Suci Wenara Wana Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

Dalam menjalani suatu pengelolaan, akan menemukan hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Pentingnya penegakan peraturan akan memperkecil kemungkinan terjadinya implikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki fundamen suatu implikasi yang ditimbulkan termasuk tindakan pengelolaan terhadap objek wisata yang dilakukan oleh manajemen Wiyata Mandala Suci Wenara Wana yang diawasi oleh Desa Adat Padangtegal. Manajemen yang dibawah oleh seorang Manajer sebagai pelaksana pengelolaan objek wisata dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh staff. Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan tidak terlepas dari permasalahan sehingga berbenah pada pedoman perlu dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan.

Adanya objek wisata Mandala Suci Wenara Wana banyak membawa dampak baik maupun dampak buruk bagi warga Desa Adat Padangtegal. Dari segi ekonomi, mendatangkan banyak wisatawan sampai mancanegara sehingga lingkungan disekitar hutan ini menjadi tempat yang strategis dan menjadi tempat produktif untuk usaha. Banyak warga Desa dengan kemajuan pariwisata di ubud khususnya di Desa Adat Padangtegal bisa memanfaatkan lahan yang berada dalam pekarangan rumah dengan menjadikan tempat tinggal wisatawan sampai di pinggir jalan yang dibangun ruko yang dipergunakan sendiri atau dikontrakan. Hal ini sangat membantu warga dari segi finansial. Objek wisata ini merupakan lahan yang dimiliki Desa Adat Padangtegal sehingga Desa juga ikut merasakan dampak baik dari adanya objek wisata ini. Dengan kemajuan ini Desa Adat juga bisa mengembangkan nilai lahan yang ada di dalam kawasan objek wisata dengan membangun central parkir. Lahan ini juga dibebaskan digunakan untuk warga desa dalam beraktifitas dan menaruh kendaraan. Dalam penggunaan dananya banyak program yang bisa dibangun desa seperti; membangun infrastruktur desa, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi akademik sampai non akademik,

membangun sarana olahraga, memberikan jaminan kepada masyarakat, dan membuka lapangan pekerjaan. Dari penggunaan dana oleh aparat desa akan diperiksa melalui BPK desa yang bersifat netral, badan ini dibentuk agar transparansi terhadap pengelolaannya bisa terjamin.

Warga yang berada di dekat objek wisata ini paling merasakan dampaknya. Baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Hal yang dirasakan warga yang tinggal berdekatan dengan objek wisata tersebut, ada monyet yang mengganggu ke rumah warga Desa mengingat penduduk utama hutan ini adalah monyet. Penerapan dari segi pengawasan management perlu ditingkatkan mengingat sering kali ada monyet yang keluar dari kawasan hutan masuk ke rumah warga untuk bermain sampai mencari makan yang kedatangannya berkelompok. Warga yang rumahnya berada pada pinggir sungai yang terhubung dengan hutan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana, yang jaraknya mencapai 500 meter dari objek juga menjadi tempat singgah kera. Hal ini perlu diperhatikan pihak manajemen dan Desa Adat. Pembentukan aturan dan pengalihan maupun penambahan fungsi dari pekerja perlu dirumuskan dalam aturan Mandala Suci Wenara Wana sehingga penugasan pada pos keluarnya kera bisa diawasi untuk menjamin keselamatan warga.

Dalam pelaksanaan pengelolaan perlu dirumuskan pasal-pasal dalam awig-awig maupun pararem yang secara umum mengatur tentang hubungan warga dengan objek wisata dalam hal dampak yang bisa ditimbulkan dengan masuknya monyet ke rumah warga dan kemungkinan lain yang bisa terjadi. Rumusan peraturan nantinya diharapkan bisa efektif dalam mengatur keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Selain dirumuskan aturan tersebut secara internal dalam pelaksanaan penugasan pekerja juga perlu dirumuskan ke dalam aturan dasar peraturan objek wisata Mandala Suci Wenara Wana guna mengefektifkan peran pekerja untuk kepentingan bersama demi terciptanya lingkungan yang nyaman, tentram dan harmonis. Banyak warga yang melaporkan seringnya sekelompok monyet masuk dalam rumah warga, dari pelaksanaan penugasan, perlu adanya peran dari seluruh pihak agar bisa bekerjasama dengan baik. Penugasan dalam batas-batas hutan perlu ditambah guna mencegah monyet yang keluar dari objek wisata. Dalam komunikasi dengan warga sudah terlaksana dengan baik namun dari pelaksanaan penugasan bila ada laporan monyet yang keluar dari hutan kurang sigap mengingat jumlah pekerja dalam bidangnya tidak bisa mencakup semua objek. Hal ini harus bisa dibenahi agar apa yang menjadi keinginan bersama bisa terwujud.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan objek Wisata Mandala Suci Wenara Wana di Desa Adat Padangtegal belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat kekosongan dalam pengaturan pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan hingga saat ini. Implikasi dari pengelolaan objek Wisata Mandala Suci Wenara Wana di Desa Adat Padangtegal menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat di sekitar objek wisata. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dari segi perekonomian yakni pemanfaatan lahan sebagai tempat usaha, dan menikmati fasilitas parkir yang berada di objek wisata secara bebas. Dampak negatif yang ditimbulkan ialah kenyamanan dan keamanan masyarakat yang berada di sekitar objek terganggu akibat keberadaan monyet yang sering berkeliaran ke rumah warga.

2. Saran

Berkaitan simpulan penelitian di atas, peneliti menyarankan kepada Lembaga Desa Adat Padangtegal untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal membentuk suatu peraturan Desa atau awig-awig Desa Adat yang jelas mengatur mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam keikutsertaan dalam mengelola objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, M. (2014). Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 276–295.
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing: Malang.

- Mrai yana, R. (2010). *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Kencana: Jakarta.
- Primadona, G. I. (2011). Perancangan Kawasan Terpadu Wisata Alam dan Budaya. *Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung*, 1(2), 43–58.
- Salambue, R., Fatayat, Mahdiyah, E., & Andriyani, Y. (2020). Pengembangan Daya Tarik Objek Wisata Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 4(1), 9–18.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. S. B. (2003). *Metode Penelitian Hukum Jakarta*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, I. G. A. A. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Bali Berkelanjutan Menghadapi Pasar Bebas Asean (afta). *Jurnal Mitra Manajemen Online*, 2(6), 680–692.
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2010). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Pustaka Larasan. Jakarta.
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika.